

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab satu penulis akan membahas mengenai Pendahuluan. Bab ini akan dibagi menjadi tujuh sub bab, antara lain sebagai berikut : latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Sub bab tersebut masing-masing akan dipaparkan sebagai berikut

A.Latar Belakang Masalah

Negara Inggris mempunyai nama resmi United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. United Kingdom adalah sebuah negara kesatuan yang terdiri dari empat negara yang masing-masing berdiri sendiri yaitu England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Negara ini berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan Wales di sebelah barat, Laut Irlandia di barat laut, Laut Keltik di sebelah barat daya, Laut Utara di sebelah timur dan Selat Inggris di sebelah selatan. Secara geografis Selat Inggris inilah yang memisahkan wilayah Inggris dan daratan Benua Eropa. Sistem Pemerintahan Inggris adalah gabungan dari *parliamentary democracy* dengan *constitutional monarch*. Sehingga Inggris dipimpin oleh Ratu sebagai Kepala Negara dan Prime Minister sebagai Kepala Pemerintahan.

Awalnya pada tahun 1950-an Uni Eropa masih sebatas komunitas kerjasama yang berfokus pada kerjasama ekonomi kawasan. Proses integrasi

Eropa bermula dari dibentuknya European Coal and Steel Community dengan traktat yang ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luxemburg, dan Prancis pada tanggal 18 April 1951. Kerjasama ekonomi ini awalnya hanya beranggotakan 6 negara. Kemudian para menteri luar negeri keenam negara memutuskan untuk memperluas kerjasamatidak hanya pada biji besi dan baja tetapi keseluruhan bagian ekonomi dengan membentuk kerjasama lain yaitu European Atomic Energy Community (Euratom) dan European Economic Community yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Pada tanggal 8 April 1965, European Coal and Steel Community , European Atomic Energy Community, European Economic Community digabung menjadi satu yaitu European Community. Seiring berjalannya waktu European Community semakin mengalami kemajuan dalam integrasi dan kebijakan sehingga pada tanggal 1 November 1993 dengan Perjanjian Maastricht (Treaty on European Union) European Community dirubah menjadi Uni Eropa.¹

Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, awalnya Inggris menolak untuk bergabung dengan lembaga bentukan sejumlah negara negara di Eropa. Inggris lebih tertarik untuk menjalankan hubungan bilateral dengan sejumlah mantan koloninya yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Pada tahun 1960-an pandangan Inggris mulai berubah. Saat itu Inggris mulai menyadari pentingnya menjalin kerjasama yang erat dengan negara-negara tetangganya di Eropa sebagaimana yang telah disadari lebih dulu oleh 6 negara pemrakarsa

¹Edison Muclis, *Integrasi menuju Uni Eropa*, CSIS. Jakarta. 1997. hal 550-555

European Coal and Steel Community. Dengan didirikannya ECSC, Industri Inggris sangat dirugikan karena tidak dapat bersaing dengan Jerman, Perancis, dan Italia yang dapat dengan bebas bergerak diantara negara anggota ECSC.

Tahun 1961 Inggris menyampaikan permintaan untuk bergabung ke European Community. Namun keinginan itu mendapat penolakan dari sejumlah negara Eropa, khususnya Perancis. Permintaan Inggris ditolak dua kali oleh Charles de Gaulle yang menjabat sebagai presiden pada saat itu. Setelah de Gaulle lengser dan digantikan Felix Gouin, tepatnya pada 1967, Inggris kembali melamar menjadi anggota European Community. Langkah Inggris membuahkan hasil pada 1 Januari 1973 permohonan itu diterima dan Inggris resmi bergabung dengan European Community.²

Setelah bergabungnya Inggris ke European Community, 2 tahun setelahnya yaitu pada 5 Juni 1975 Inggris mengadakan referendum apakah mereka akan tetap bergabung atau keluar dari keanggotaan European Community. Setelah diadakannya referendum, mayoritas dari daerah administratif di Inggris sejumlah 67,2% menjawab “ya” untuk tetap di Uni Eropa. Referendum pertama ini menghasilkan keputusan bagi Inggris untuk tetap melanjutkan keanggotaannya di European Community.³

²Hansard. “European Community Parliamentary Debates”. *House of Commons*. 1975 hal. 1465-1480.

³Prasetyo, Z. “Selasar Politik”. (28 Juli 2016). www.selasarpolitik.com/politik/brexit-mengingat-kembali-referendum-1975 . (diakses pada 22 Agustus 2016)

Sejak bergabung dengan Uni Eropa, Inggris mendapatkan keuntungan yang banyak dari kebijakan European Single Market. Menurut anggota Confederation of British Industry (CBI) dan 67% Small and Medium Size Enterprises (SMEs) Uni Eropa membawa dampak positif di bisnis mereka. CBI memperkirakan bahwa keuntungan yang didapat Inggris sekitar 4–5 % dari GDP Inggris atau sekitar 62 billion – 78 billion Euro pertahun. Pada tahun 2014 Uni Eropa menyumbangkan 44,6 % dari seluruh ekspor barang dan jasa Inggris dan 53,2 % dari impor barang dan jasa Inggris. Kontribusi ekspor impor ke Uni Eropa untuk perekonomian Inggris tahun 2015 adalah 187 miliar Euro.⁴ Dikutip dari Sky News, dari total seluruh eksport Inggris ke negara lain, lebih dari 50% eksport Inggris dikirim ke negara anggota Uni Eropa.

Semakin terintegrasinya European Community mengundang beberapa negara sekitar untuk ikut terintegrasi. Berawal dari 6 negara pemrakarsa, kemudian negara-negara di Eropa Barat mulai bergabung; Denmark, Irlandia, dan Inggris ditahun 1973, disusul dengan Yunani (1981); Portugal dan Spanyol (1986). Kemudian Austria, Finlandia, dan Swedia bergabung (1995). Tahun 1997 Siprus, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Polandia dan Slovenia mengadakan pembicaraan dengan Uni Eropa. Kemudian Uni Eropa bernegosiasi dengan Bulgaria, Latvia, Lithuania, Malta, Romania dan Slovakia. 10 negara tersebut resmi menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. Tidak berhenti sampai disitu, tahun 2004 Bulgaria dan Romania bergabung menyusul Croatia yang bergabung

⁴Lewis, K. "What has European Union done for us". The Independent News. (25 juni 2016). www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-what-has-european-union-done-for-us-david-cameroon-brexit-a6850 . (diakses pada 22 januari 2017)

pada tahun 2013 dan sampai sekarang pembicaraan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa masih berlangsung.⁵

Ketika banyak negara ingin bergabung dengan Uni Eropa, Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Pada tahun 1975 Inggris mengadakan referendum pertama yang menghasilkan keputusan untuk melanjutkan keanggotaannya. Disusul dengan referendum kedua yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016 yang berujung dengan 51,9% suara rakyat Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa⁶.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka untuk mempermudah dalam pembahasan selanjutnya dapat ditarik pokok permasalahan sebagai berikut :

“ Mengapa Inggris memutuskan untuk keluar dari keanggotaannya di Uni Eropa tahun 2016? “

C. Kerangka Teori

Dalam penelitian Skripsi ini, penulis lebih menekankan pada penggunaan Teori Politik Luar Negeri yang dipaparkan oleh William D. Coplin, dengan alasan bahwa teori tersebut cukup memadai untuk mengorganisasikan dan

⁵<https://europa.eu>.(15 Desember 2016). European Union:https://europa.eu/europeanunion/about-eu/countries/member-countries_en. (diakses pada 15 Desember 2016)

⁶Beddoes,Z.M, "The Brexit Brief: our guide to Britain's EU Referendum,"The Economist(Juni,2016),hal.5

menata fakta yang penulis teliti. Dengan ketepatan teori, pembahasan sebuah masalah akan terukur dengan jelas dan tidak melenceng dari garisnya.

Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri(William D Coplin)

Teori Politik Luar Negeri adalah teori yang mengungkapkan berbagai macam struktur internal suatu negara dan pengaruhnya terhadap tindakan dan perilaku kebijaksanaan eksternal / luar negerinya.⁷ Menurut Coplin, kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah proses di mana ada tuntutan dari domestic politics, serta dengan melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi para pembuat kebijakan, yang kemudian meramunya menjadi sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional.

William D. Coplin menyatakan :

*To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision. However, it would be mistake to thiunk that foreign policy act may be viewed the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision maker state. The second is the economy and military capability of the state. The third is the international context the particular position in which his state finds it self especially in relation to other state in system.*⁸

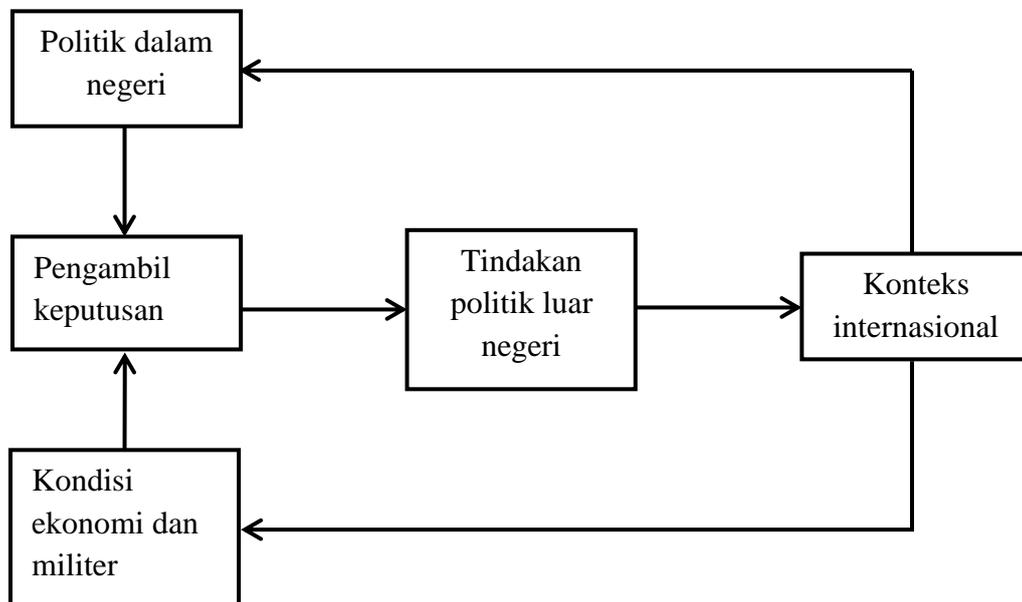
Berdasarkan pada apa yang dipaparkan Coplin, politik luar negeri suatu negara terbentuk dengan setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, serta lingkungan internasionalnya. Dengan mempertimbangkan kondisi politik dalam negeri dan kemampuan ekonomi militer suatu negara, keputusan politik luar negeri suatu

⁷Warsito, T. "Teori - Teori Politik Luar Negeri". (Yogyakarta: Bigraf Publishing. 1998.) hal. 28.

⁸Coplin, W. D. "Pengantar Politik Internasional". (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo. 2003). hal.30

negara dibentuk sebagai respon atas suatu situasi internasional. Politik luar negeri yang bersifat umum terdiri atas serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan langsung. Untuk mempermudah pemahaman mengenai teori ini, William D. Coplin menjelaskan melalui bagan berikut ini :

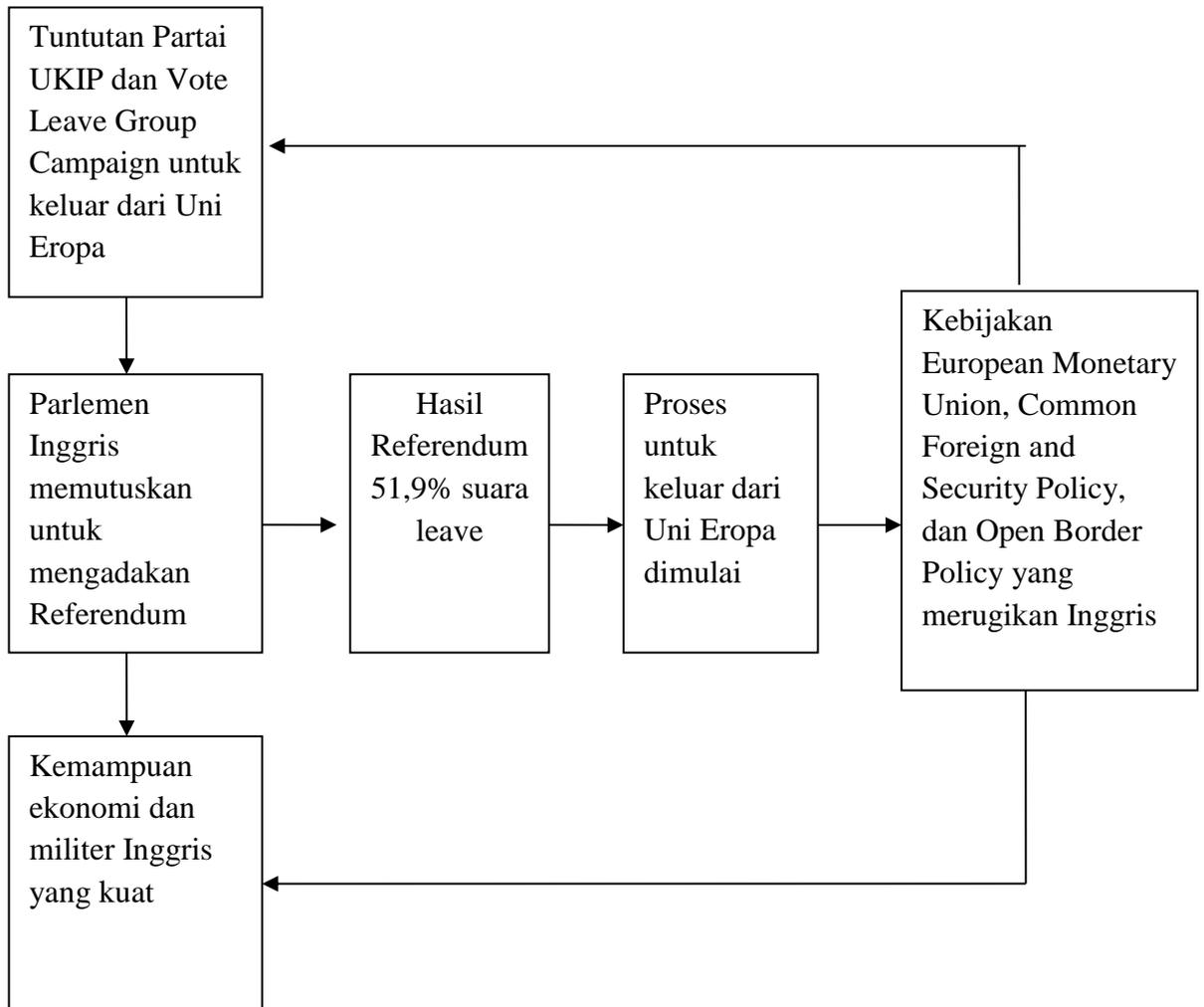
Bagan 1.1 Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri William D. Coplin



Sumber: William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, Sinar Baru, Bandung, 1992, Hal.30.

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pengambil keputusan mempertimbangkan politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional dalam membuat kebijakan politik luar negerinya. Sehingga, kebijakan yang diambil suatu negara bukan semata-mata keinginan pribadi dari pengambil keputusan, namun merupakan hasil dari pertimbangan terhadap tiga konsideran tersebut.

Bagan 1.2 Aplikasi Teoritik Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri Coplin



Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah proses di mana ada tuntutan dari domestic politics, serta dengan melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi para pembuat kebijakan, kemudian meramunya menjadi sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional.⁹

⁹Ibid.

Melihat tuntutan dari masyarakat Inggris, keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa diawali dari isu kedaulatan yang diperselisihkan oleh para politisi dan masyarakat Inggris. Integrasi Inggris ke Uni Eropa berarti mengalihkan sejumlah kekuasaan nasional ke lembaga pusat yaitu Uni Eropa. Semakin terintegrasinya Uni Eropa, maka secara otomatis Inggris terikat dengan regulasi yang dibuat Uni Eropa sehingga kehilangan lebih banyak wewenang dan kedaulatan politik negaranya. Kedaulatan yang dimaksud adalah kemampuan sebuah negara untuk memerintah, membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum dan tarif pajaknya sendiri. Sejak tahun 2010 Uni Eropa telah memperkenalkan lebih dari 3500 hukum baru yang mempengaruhi ekonomi Inggris.¹⁰

Dalam menganalisa situasi politik dalam negeri, Coplin mengemukakan empat tipe *policy influencers* : (1) *partisan influencer* , (2) *bureaucratic influencer*, (3) *interest influencers*, dan (4) *mass influencers*. Tipe *partisan influencers* dan *interest influencers* adalah tipe yang tepat untuk menganalisa situasi politik yang terjadi di Inggris. Tipe *partisan influencer* adalah partai partai politik. *Influencers* ini bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis, yaitu tuntutan-tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan pemerintah.¹¹

Partisan influencer yang berpengaruh di Inggris adalah Partai Independen Inggris Raya (*United Kingdom Independence Party*) meraih urutan ketiga dalam

¹⁰Brinded, L. "Reasons why UK leaving the EU Brexit is a good idea". *Bussiness Insider*. 2015

¹¹Coplin, W.D., *Op.Cit.* hal. 81

pemilu 2015. Dikutip dari BBC.com, hasil *General Election* 2015 Partai Independen Inggris meraih 12,6% suara yang membuat partai tersebut menduduki posisi nomer tiga setelah Partai Konservatif dan Partai Buruh. Partai Independen di Inggris Raya (UKIP) muncul dan langsung mempengaruhi masyarakat seputar isu menentang Eropa. Meningkatnya opini umum menentang Uni Eropamenyebabkan partai tersebut meraih dukungan banyak dari rakyat Inggris. Partai Independen berhasil meraih kursi di Parlemen Inggris dan menggunakan posisinya di Parlemen untuk menikam Uni Eropa.¹²

Salah satu alasan Partai ini menentang keanggotaan di Uni Eropa adalah kesejahteraan ekonomi di Uni Eropa yang dianggap kurang merata sehingga membebani Inggris. Alasan terbesar kedua adalah tuntutan untuk mengakhiri kebijakan politik pintu terbuka terhadap para imigran yang dibuat oleh Uni Eropa.¹³

Partisan influencer didukung oleh *interest influencer* sebagai hasil dari tuntutan yang diajukan. Dalam sistem politik terbuka, *interest influencers* memainkan peran yang lebih besar. Menjelang referendum, Opini referendum terbagi menjadi dua organisasi kampanye yaitu *Leave* untuk keluar dari Uni Eropa dan *Remain* untuk tetap di Uni Eropa. Didalam kelompok *Leave* terdapat dua kubu

¹²UK General Election 2015”,BBC News,diakses dari <http://www.bbc.com/news/uk-politics-39631768> pada tanggal 1 Desember 2016

¹³Thorleifsson, C. “From coal to UKIP : the struggle over identity in post-industrial Doncaster”. *History and Anthropology*, 2016. hal.12.

utama yaitu *Grassroots Out(Leave EU)* dan *Vote Leave*. Sedangkan di *Remain* terdapat *We Are Stronger in Europe*.¹⁴

Tuntutan Masyarakat menyebabkan perpecahan di antara para politisi, elit dan rakyat Inggris yang akhirnya membuat pemerintah Inggris menuntut Uni Eropa atas pengembalian sebagian kekuasaan melalui ancaman diselenggarakannya referendum untuk meninggalkan Uni Eropa. Keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa didasarkan pada hasil dari referendum yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2016. Hasil dari referendum tersebut adalah 51,9% suara rakyat Inggris untuk keluar dari Uni Eropa dan 48,1% suara rakyat Inggris untuk tetap di Uni Eropa. Hasil referendum ini merupakan keputusan yang mewakili suara rakyat Inggris terhadap masadepan hubungan negaranya dengan Uni Eropa.

Kondisi Ekonomi Dan Militer

Pengambil keputusan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer dalam membuat kebijakan luar negeri mereka. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya ketika ia menyusun politik luar negeri. Pengambil keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer.¹⁵

Ekonomi dan militer merupakan kekuatan sebuah negara. Menurut Coplin, kondisi ekonomi negara maju dicirikan oleh (1) GNP per kapita yang relative

¹⁴Murray, G. "Brexit for Beginners-The who what, and why of the British EU referendum". *The Green European Foundation*, 2016. hal.1-4.

¹⁵Coplin, W.D.,*Op.Cit.* hal. 124

tinggi; (2) kapasitas produksi industri yang lebih bervariasi dengan suatu spesialisasi di bidang produk manufaktur; (3) angkatan bersenjata konvensional yang terlatih baik, dan memainkan peran ekstensif dalam politik luar negeri; dan (4) sangat terlibat dalam perdagangan dunia. Berdasarkan indikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Inggris merupakan negara maju.

Perekonomian Inggris merupakan salah satu perekonomian terbesar di dunia, menurut data dari World Bank, Inggris merupakan negara income yang tinggi dengan GDP 2,99 Triliun Dolar Amerika ditahun 2014. Mata uang resmi di Inggris adalah poundsterling (ISO 4217, GBP). Inggris adalah negara dengan kondisi ekonomi yang maju. Bahkan sebelum masuk Uni Eropa, Inggris telah menjadi negara dengan ekonomi yang maju dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Inggris juga merupakan salah satu negara penyumbang terbesar di Uni Eropa. Pada tahun 2015, Inggris menjadi penyumbang kedua terbesar setelah Jerman dengan jumlah pendanaan hampir mencapai 6,5 milyar euro.

Inggris mempunyai kekuatan militer yang kuat. Dari situs Global Firepower tahun 2015, lembaga analisis militer menyebutkan bahwa Inggris menduduki peringkat nomor 6 dari total 126 negara. Data dari *nationmaster.com* Inggris merupakan negara ke empat dengan anggaran militer terbesar setelah Rusia yaitu 62,7 billion US\$. Kekuatan militer Inggris memang tidak dapat diremehkan, dibandingkan dengan negara anggota Uni Eropa yang lain, hanya Prancis yang menyusul dengan satu peringkat dibawah Inggris. Inggris mempunyai kursi tetap di Dewan Keamanan PBB dan mempunyai kemampuan nuklir. Tidak hanya itu,

Inggris merupakan Negara dengan alokasi militer besar, GDP 2% untuk militer Negara tersebut.¹⁶

Di dalam keanggotaan Uni Eropa, Inggris adalah Negara yang tidak mendukung adanya gagasan untuk menciptakan kekuatan integrasi militer di Uni Eropa. Menurut Perdana Menteri David Cameron, tanggung jawab pertahanan militer itu adalah tanggung jawab nasional setiap Negara- bukannya Uni Eropa- tidak ada kemungkinan posisi Inggris untuk berubah pikiran dan tidak ada kemungkinan adanya European Army.¹⁷ Selain bergabung dengan NATO, Inggris juga mempunyai beberapa aliansi militer dengan negara diluar anggota Uni Eropa, yaitu *United States, Gulf Allies , dan Commonwealth member*.

Inggris merasa beberapa kebijakan ekonomi dan militer Uni Eropa tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional Inggris. Hal ini membuat kondisi ekonomi dan militer Inggris berkemungkinan untuk menjadi tidak stabil. Komitmen politik luar negeri suatu negara harus diimbangi oleh kemampuan ekonomi dan militernya. Kemampuan ekonomi dan militer Inggris cukup kuat untuk mengimbangi komitmennya keluar dari Uni Eropa. Hal ini semakin memperkuat kepercayaan warga Inggris untuk lepas dari bayang bayang Uni Eropa.

Konteks Internasional

¹⁶Liana, S. M. "*Brexit Stirs NATO*". (London: CS Monitor. 2016)

¹⁷Sparrow, A. "*Jean Claude Juncker Calls For EU*". (London: The Guardians. 2015)

Coplin menyatakan ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara-negara tersebut dengan negara-negara lain.

Elemen pertama dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik suatu negara adalah kondisi geografis yang terkait dengan lokasi yang diduduki oleh Inggris dan kaitannya dengan negara-negara lain disekitarnya. Lokasi geografis negara Inggris berada di lingkup benua Eropa meskipun wilayah daratannya terpisah dari daratan benua Eropa. Meskipun ikut tergabung dalam Benua Eropa, akan tetapi Inggris tidak sepenuhnya merasa dirinya merupakan anggota Benua Eropa. Secara geografis letak negara Inggris terpisah dengan daratan Eropa. Dan juga secara historis, Inggris merasa tidak saling terkait dengan negara - negara di Eropa.¹⁸

Selain kondisi geografis, hubungan politik dan ekonomi Inggris dengan Uni Eropa tidak selalu berjalan dengan mulus. Beberapa kebijakan Uni Eropa bertentangan dan bahkan banyak merugikan Inggris. Beberapa kebijakan tersebut adalah *European Monetary Union*, *Common Foreign Social Policy*, dan Kebijakan Politik Pintu Terbuka terhadap para imigran.

¹⁸Wilmann, Olyver, "*The UK Chose Brexit*". (London: Mars and McLennan Companies. 2016).hal

European Monetary Union adalah kebijakan mata uang tunggal (Euro) dan kebijakan ekonomi bersama.¹⁹Common Foreign Social Policy adalah kebijakan yang mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh negara anggota harus mendapat persetujuan dari negara anggota Uni Eropa lainnya.Di luar Uni Eropa, Inggris akan bebas untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan yang jauh lebih liberal dengan negara-negara dunia ketiga daripada di Uni Eropa.²⁰

Salah satu masalah yang paling hangat diperdebatkan atas alasan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa adalah imigran. Permasalahan ini memunculkan rasa khawatir rakyat Inggris akan dampak jangka panjang dari para imigran yang mendapatkan kebebasan untuk mencari pekerjaan di Inggris. Kebijakan tersebut dinilai akan merugikan penduduk asli yang berasal dari Inggris dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.²¹

D. Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesa bahwa alasan Inggris memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa adalah

1. Dorongan Partai Independen Inggris (*United Kingdom Independence Party*) dan *Vote Leave Group Campaign* untuk keluar dari Uni Eropa. Sehingga diadakan Referendum pada 23 Juni 2016 dengan hasil Inggris memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

¹⁹Pratama, A. H. *Qureta*. (10 September 2016). www.ureta.com/post/perlawanan-inggris-terhadap-uni-eropa-melalui-brexit . (diakses pada10 November 2016)

²⁰Andre.*ekoran.co.id*. (19 Juli 2016). <https://ekoran.co.id/alasan-inggris-keluar-dari-uni-eropa/6459/> . (diakses pada19 Agustus 2016)

²¹Catherine Boyle, "just what is the UK's problem with Europe?,"*CNBC*,27 Mei,2015,hal.3.

2. Kondisi ekonomi dan militer Inggris dianggap mampu mengimbangi komitmennya keluar dari Uni Eropa.
3. Secara internasional konteks, beberapa kebijakan Uni Eropa dianggap semakin merugikan Inggris.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa alasan Inggris keluar dari Uni Eropa pada tahun 2016
2. Untuk memenuhi syarat akhir dalam menempuh pendidikan jenjang S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam tulisan ini , sesuai dengan tema yang akan dibahas , penulis akan membatasi ruang lingkup sampai dengan referendum kedua inggris dibulan juli 2016. Penulis akan mengamati data dari tahun 2000 sampai 2016 untuk menganalisis pertimbangan Inggris memutuskan kebijakan luar negerinya. Juga, keterbatasan ini bertujuan untuk menghindari kompleksitas analisis lebih lanjut.

G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, dimana penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan alasan Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa .

2.Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dokumen, dan bahan dari internet. Data tentang Inggris, kebijakan Uni Eropa, pengambilan kebijakan luar negeripada penelitian ini didapatkan dari beberapa buku, jurnal, dan internet.

3.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. Selain itu, juga mengunjungi beberapa situs di internet untuk melengkapi data yang penulis kumpulkan.